

SKRIPSI



FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA

Disusun Oleh

A. DEWI AYU VENEZA

B 111 06 777

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN
PELAKU TINDAK PIDANA**

Disusun dan Diajukan

Oleh

A. DEWI AYU VENEZA

B 111 06 777

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA

Disusun dan diajukan oleh
ANDI DEWI AYU VENEZA
B 111 06 777

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 9 Januari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



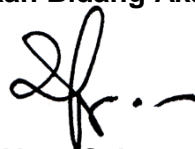
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198804 1 002

Sekretaris



Hj. Haerarah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : A. Dewi Ayu Veneza

NIM : B 111 06 777

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **“Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban
Dan Pelaku Tindak Pidana”.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, September 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP : 19590317 198804 1 002



Haeranah, S.H., M.H.
NIP : 19661212 199204 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : A. Dewi Ayu Veneza
NIM : B 111 06 777
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : “Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan
Pelaku Tindak Pidana”.

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, September 2013

**a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

A. Dewi Ayu Veneza (B111 06 777), Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana. Di Bawah Bimbingan Muhadar Selaku Pembimbing I dan Haeranah Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar, dan Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama; dan (II) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YME yang telah memberikan curahan kasih sayangNya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :“ **Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana**”.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis, Kepada saudara penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu

Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III

4. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ibu Nur Azisa, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Bapak Mustari, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Makassar) serta para nara sumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, September 2013

Penulis

A. Dewi Ayu Veneza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Dan Klasifikasi Sidik Jari	7
1. Pengertian Sidik Jari.....	7
2. Klasifikasi Sidik Jari	11
B. Jenis-Jenis Identifikasi Forensik.....	16
C. Pengertian Dan Metode Identifikasi Sidik Jari	23
1. Pengertian Identifikasi Sidik Jari	23
2. Metode Identifikasi Sidik Jari	24

D. Sejarah Hukum Identifikasi Sidik Jari	25
E. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
F. Ilmu-Ilmu Pembantu Dalam Hukum Acara Pidana.....	34
G. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	36
 BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	44
E. Sistematika Penulisan.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Mengungkap Pelaku Tindak Pidana.....	46
1. Fungsi Sidik Jari	46
2. Akibat Hukum Kesalahan Identifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana.....	55
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Pihak Kepolisian Dalam Menggunakan Sidik Jari Sebagai Sarana	

Identifikasi Korban Dan Mengungkap Pelaku Tindak	
Pidana	57
1. Faktor Di TKP.....	58
2. Faktor Di Luar TKP	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 : Klasifikasi Sidik Jari <i>Arches Loops Whorls</i>	11
GAMBAR 2 : Klasifikasi Sidik Jari <i>Core</i>	13
GAMBAR 3 : Klasifikasi Sidik Jari <i>Delta</i>	13
GAMBAR 4 : Klasifikasi Sidik Jari <i>Terminasi</i>	14
GAMBAR 5 : Klasifikasi Sidik Jari <i>Minutiae</i>	14
GAMBAR 6 : Klasifikasi Sidik Jari Percabangan.....	14
GAMBAR 7 : Enam Kategori Klasifikasi Sidik Jari Berdasarkan <i>Delta</i> Dan <i>Core</i>	15
GAMBAR 8 : Bukti Segitiga di TKP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka asas kesadaran hukum merupakan asas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonesia. Namun hal yang selalu terjadi dengan adanya peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang baru, dapat dipastikan akan terjadi sebuah pelanggaran akan hal tersebut. Dengan kata lain, sebuah kejahatan berawal dari adanya peraturan. Disinilah peranan aparat pemerintah terutama instansi yang bertanggung jawab langsung akan hal penegakan hukum untuk perlu meningkatkan pola kerja

dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada namun harus ditemukan” (**Satjipto Rahardjo**, 2006:124). Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan serta pembunuhan, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyarakat.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Menurut Aristoteles (**Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa**, 2009:1) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat

diperhatikan lebih serius lagi baik bagi aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, yang secara operasional di dalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (**Ninie Suparni**, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga

untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah (**Supardi**, 2002:18).

Identifikasi Sidik jari dikenal dengan daktiloskopi. Daktiloskopi adalah merumus pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Metodanya dikenal dengan metode Henry, Rocher dan Vucetich. Metode Henry diciptakan di India dan dipakai di hampir semua negara di Eropa, Metode Rocher digunakan di negara Jerman dan Jepang, sedangkan Metode Vucetich digunakan pada negara-negara berbahasa Spanyol. Indonesia sendiri menggunakan Metoda Henry. Fungsi dari sidik jari ialah bisa digunakan untuk pengungkapan kejahatan, misalnya dari sidik jari laten (pengambilan sidik jari menggunakan serbuk kimia) yang didapat dari barang-barang di TKP, atau barang-barang yang digunakan untuk “melakukan kejahatan” seperti pistol, pisau, tang obeng dan sebagainya (**Supardi**, 2002:19).

Seperti halnya di Kota Makassar, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar guna menetapkan seorang tersangka, pada kasus tindak pidana pencurian, barang bukti berupa sidik jari tersangka

dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 143 / XII / 2011 / Reskrim, Tanggal 17 Desember 2011. Pada kasus lain dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polrestabes Makassar guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, barang bukti berupa sidik jari korban dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 298 / VI / 2012 / Reskrim, Tanggal 08 Juni 2012.

Letak krusialnya, dari sidik jari laten yang ditemukan polisi di TKP tersebut, polisi melakukan pemotretan sidik jari lalu dibandingkan dengan data sidik jari dalam file kepolisian. pada waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber data yang berharga bagi polisi untuk mencari data guna membandingkan sidik jari di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 titik yang sama dalam satu ruas jari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa kelingking saja atau bisa ibu jari saja (**Supardi**, 2002:20).

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai fungsi dan peranan sidik jari, sehingga penulis memilih judul **“Fungsi Dan Peranan Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai fungsi dan peranan alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak kepolisian dalam melakukan pekerjaannya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Klasifikasi Sidik Jari

1. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. "Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama". Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi kekhasan setiap manusia. Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari sebenarnya 'adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah (Supardi, 2002: 18).

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang kepolisian sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal

184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :

- berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari,
- berita acara pemotretan, dan
- berita acara olah TKP.

Bahkan sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena terbukti relatif akurat, aman, mudah, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometri yang lainnya seperti retina mata/DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid* adalah jenis asam nukleat yang berisi perintah genetik yang digunakan di dalam perkembangan dan berfungsi pada semua organisme dan virus). Penerapan teknologi sidik jari ini tidak hanya pada sistem absensi pegawai perusahaan, tetapi juga berkembang di bidang kedokteran forensik, yaitu proses *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan laporan tertulis dokter untuk memberikan keterangan demi keperluan peradilan mengenai suatu hal yang ditemukan atau diketahui. Salah satu tahap *visum et repertum* adalah verifikasi sidik jari. Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi seseorang terhadap suatu masalah pidana, contohnya : kasus korban kecelakaan, korban tenggelam, kasus tindak pidana pembunuhan, dan lain-lain.

M. Syamsa Ardisasmita pada artikelnya yang berjudul "Pengembangan Model Matematika untuk Analisis Sistem Identifikasi Jari otomatis", menjelaskan bahwa :

"Klasifikasi kategori sidik jari merupakan bagian penting dalam sistem pengidentifikasian individu di bagian kriminologi atau forensik. Pemanfaatan identifikasi sidik jari sudah semakin meluas sebagai bagian dari biometri. Biometri adalah cabang ilmu untuk mengidentifikasi individu berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Sifat fisik harus bersifat unik yaitu dapat berupa pola garis-garis alur sidik jari, bentuk geometri tangan, kunci frekuensi suara, rincian ciri wajah, pola iris dan retina mata yang umumnya untuk setiap individu tidak sama. Jadi pola sidik jari merupakan salah satu identifikasi perorangan yang bersifat unik yang sudah lama digunakan dalam penyidikan kepolisian, sistem keamanan (*forensics and security*) dan sekarang untuk kontrol akses dan pemeriksaan kartu ATM. Sir Francis Galton (1892) adalah yang melakukan penelitian pertama mengenai keunikan sidik jari (*minutiae*)" (www.batan.go.id, diakses pada tanggal 12 April 2013, Pukul 15:20 WITA).

Pola pada tangan dan sidik jari merupakan bagian dari cabang ilmu yang disebut *dermatoglyphics*. Kata *dermatoglyphics* berasal dari kata Yunani yaitu *derma* yang berarti kulit dan *glyphe* berarti ukiran. Disiplin ilmu ini mengacu kepada formasi garis-garis alur bubungan (*ridge*) yang terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki manusia. Selama ini klasifikasi pola sidik jari dilakukan secara manual oleh manusia yang diambil dari cap jari-jari tangan pada kartu. Kini telah dibuat teknik klasifikasi sidik jari otomatis secara digital, tetapi belum ada algoritma pendekatan yang dapat diandalkan. Biasanya sebelum diklasifikasi dilakukan terlebih dahulu pra-klasifikasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan

kehandalan pencarian pada basis data yang besar. Adanya klasifikasi dapat membantu mempercepat proses identifikasi dan pencarian pada basis data sidik jari yang umumnya berjumlah besar.

Penempatan sidik jari ke dalam beberapa kelompok kelas yang mempunyai pola dasar yang serupa memungkinkan pengisian, penelusuran, dan pencocokan data sidik jari dengan pemindaian yang cepat. Klasifikasi seperti ini dapat mengurangi ukuran dari ruang pencarian, yaitu membatasi pencarian dengan hanya pada sidik jari dalam kelas yang sama untuk identifikasi.

Klasifikasi sidik jari yang digunakan secara luas adalah sistem Henry dan variasi-variasinya yang diperkenalkan oleh Edward Henry (1899). Metode klasik identifikasi sidik jari yang selama ini digunakan, ternyata kurang sesuai untuk implementasi langsung dalam bentuk algoritma komputer. Oleh karena itu perlu dikembangkan model matematika untuk *analisis* sistem identifikasi sidik jari otomatis (*AFIS / Automatic fingerprint identification systems*).

Sebagian besar sistem untuk identifikasi sidik jari didasarkan pada pencocokan *minutiae* yaitu akhir atau percabangan garis alur sidik jari. Deteksi dari *minutiae* secara otomatis merupakan suatu proses kritis, terutama jika citra sidik jari berkualitas rendah dengan pola garis alur tidak jelas. Akibat *noise* dan kurangnya kontras menyebabkan adanya konfigurasi titik-titik gambar yang menyerupai

minutiae palsu (menutupi *minutiae* sebenarnya). Maka tujuan dari pemodelan sidik jari ini ada 2 (dua) yaitu, pertama adalah untuk memahami penggambaran matematika untuk membuat pola sidik jari tiruan, dan kedua dalam mengembangkan algoritma baru yang lebih baik untuk sistem identifikasi sidik jari secara otomatis.

2. Klasifikasi Sidik Jari

Menurut Galton Klasifikasi sidik jari adalah membagi data pola garis alur sidik jari ke dalam kelompok-kelompok kelas ciri yang menjadi karakteristik sidik jari tersebut yaitu untuk mempercepat proses identifikasi. Ada dua jenis kategori sidik jari yaitu kategori bersifat umum (global) dan kategori yang bersifat khusus (lokal) yaitu untuk menggambarkan ciri-ciri khusus individual, seperti jumlah *minutiae*, jumlah dan posisi inti (*core*), dan jumlah dan posisi *delta* (www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 13 April 2013, Pukul 15:45 WITA).

GAMBAR 1 :

Klasifikasi Sidik Jari *Arches Loops Whorls*

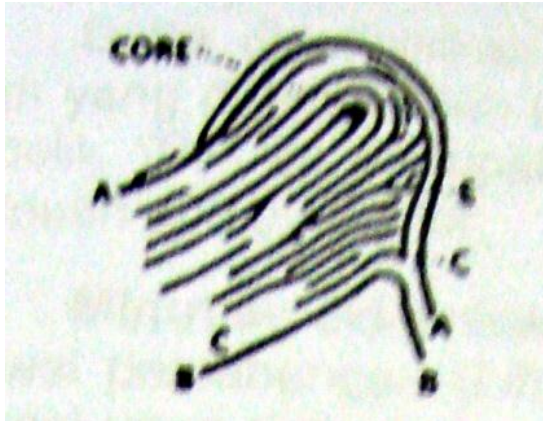


Karakteristik sidik jari yang bersifat global terlihat sebagai pola garis-garis alur dan orientasi dari garis alur tersebut pada kulit. Sir Francis Galton (1982) mengklasifikasi ciri-ciri global sidik jari dalam tiga kategori bentuk:

1. *Arches* adalah pola garis alur sidik jari berbentuk terbuka yang mencakup 5% dari populasi.
2. *Loops* adalah jenis paling umum yaitu *kurva* melingkar meliputi 60% sampai dengan 65 % dari populasi.
3. *Whorls* adalah berbentuk lingkaran penuh yang mencakup 30% sampai 35% dari populasi

Kurva terbuka (*Arches*) dibagi lagi atas *arch* dan *tented arch*. Sedangkan *loops* dibagi dua menjadi *kurva* melingkar condong ke kiri (*left loop*) dan melingkar condong ke kanan (*right loop*). Ciri-ciri lokal sidik jari ditentukan oleh jumlah dan posisi garis alur dan banyaknya percabangan dari garis-garis alur yang terdiri dari Inti / *core* (sebagai titik yang didekatnya terdapat alur-alur yang membentuk susunan semi-melingkar). Inti ini digunakan sebagai titik pusat lingkaran balik garis alur yang menjadi titik acuan pembacaan dan pengklasifikasian sidik jari.

GAMBAR 2 :
Klasifikasi Sidik Jari *Core*

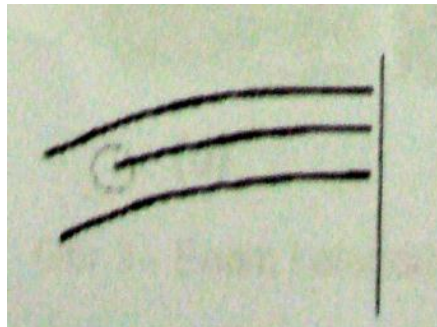


GAMBAR 3 :
Klasifikasi Sidik Jari *Delta*



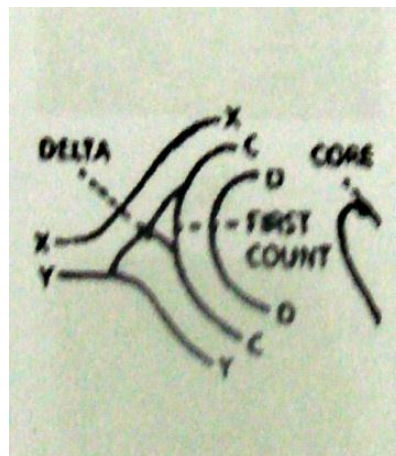
GAMBAR 4 :

Klasifikasi Sidik Jari *Terminasi*



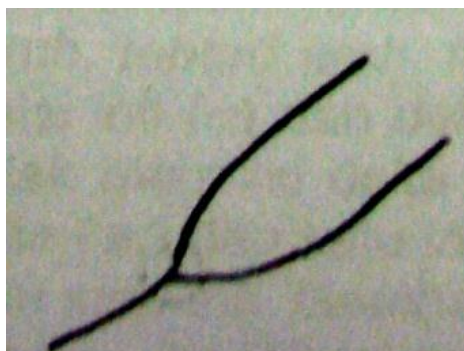
GAMBAR 5 :

Klasifikasi Sidik Jari *Minutiae*



GAMBAR 6 :

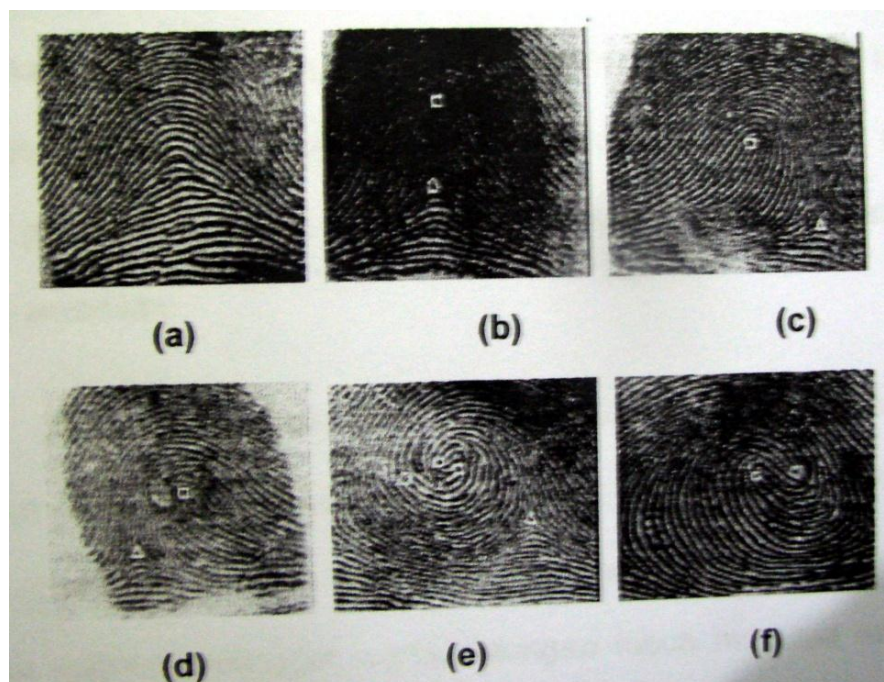
Klasifikasi Sidik Jari Percabangan



Delta didefinisikan sebagai suatu titik yang terdapat pada suatu daerah yang dibatasi oleh tiga sektor yang masing-masing memiliki bentuk hiperbolik. Titik ini merupakan pertemuan curam atau titik divergensi dari pertemuan dua garis alur. *Minutiae* didefinisikan sebagai titik-titik terminasi (*ending*) dan titik-titik awal percabangan (*bifurcafibn*) dari garis-garis alur yang memberikan informasi yang unik dari suatu sidik jari. Selain itu dikenal juga jenis garis alur (*type lines*) yaitu dua garis alur paralel yang mengelilingi atau cenderung mengelilingi daerah pola, dan cacah garis alur *idge couhtl* atau kerapatan (*density*) yaitu jumlah dari garis-garis alur dalam daerah pola.

Gambar 7 :

Enam Kategori Klasifikasi Sidik Jari Berdasarkan *Delta* Dan *Core*



Berdasarkan jumlah serta posisi *core* dan *delta* dapat dikembangkan model matematika untuk mensimulasi enam kategori klasifikasi sidik jari, yaitu: *arch*, *tented arch*, *right loop*, *left loop*, *whorl* dan *Twin Loop* berdasarkan luntan dan posisi inti (\square) dan delta (\blacktriangle). Gambar 7a memperlihatkan kategori *Arcfi* yang tidak memiliki delta dan inti. Gambar 7b adalah *Tented Arcfi* dengan satu delta (\blacktriangle) dan satu inti (\square). Gambar 7c adalah *Right Loop* dengan satu delta dan satu inti. Gambar 7d adalah *Left Loop* dengan satu delta dan satu inti. Gambar 7e *Whorl* dengan satu delta dan dua inti. Terakhir 7f adalah *Twin Loop* dengan dua inti yang tidak tercore. Hasil pengembangan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan proses identifikasi sidik jari secara otomatis.

B. JenisJenis Identifikasi Forensik

Identifikasi merupakan suatu proses mencari tahu, meneliti sesuatu hal yang kabur atau tidak diketahui agar menjadi jelas identitasnya atau asal usulnya. Identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam beberapa kasus pidana, menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.

Peran ilmu kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang rusak, membusuk, hangus terbakar dan kecelakaan massal, bencana alam, dan huru hara yang

mengakibatkan banyak korban meninggal, serta potongan tubuh manusia atau kerangka. Selain itu, identifikasi forensik juga berperan dalam berbagai kasus lain seperti penculikan anak, bayi tertukar, atau diragukan orangtuanya. Identitas seseorang dapat dipastikan bila paling sedikit ada dua metode yang digunakan sehingga memberikan hasil positif / tidak meragukan (www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 12 April 2013, Pukul 15:20 WITA).

1. Pemeriksaan sidik jari

Metode ini membandingkan sidik jari jenazah dengan data sidik jari antemortem. Sampai saat ini, pemeriksaan sidik jari merupakan pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatannya untuk menentukan identitas seseorang. Dengan demikian harus dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya terhadap jari tangan jenazah untuk pemeriksaan sidik jari, misalnya dengan melakukan pembungkusan kedua tangan jenazah dengan kantong plastik.

2. Metode Visual

Metode ini dilakukan dengan memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarga atau temannya. Cara ini hanya efektif pada jenazah yang belum membusuk, sehingga masih mungkin dikenali wajah dan bentuk tubuhnya oleh lebih dari satu orang. Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi yang turut berperan untuk membenarkan atau sebaliknya menyangkal identitas jenazah tersebut.

3. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan dalam saku pakaian yang dikenakan makin sangat membantu mengenali jenazah tersebut. perlu diingat bahwa pada kecelakaan massal, dokumen yang terdapat dalam tas atau dompet yang berada dekat jenazah belum tentu adalah milik jenazah yang bersangkutan.

4. Pemeriksaan Pakaian dan perhiasan

Dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan jenazah, mungkin dapat diketahui merek atau nama pembuat, ukuran, inisial nama pemilik, *badge* yang semuanya dapat membantu proses identifikasi walaupun telah terjadi pembusukan pada jenazah tersebut. Khusus anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), identifikasi dipermudah oleh adanya nama serta NRp (Nomor Registrasi Polisi) yang tertera pada kalung logam yang dipakainya.

5. Identifikasi Medik

Metode ini menggunakan data umum dan data khusus. Data umum meliputi tinggi badan, berat badan, rambut, mata, hidung, gigi dan sejenisnya. Data khusus meliputi tatto, tahi lalat, jaringan parut, cacat kongenital, patah tulang, dan sejenisnya. Metode ini mempunyai nilai tinggi karena selain dilakukan oleh seorang ahli dengan menggunakan berbagai cara modifikasi (termasuk pemeriksaan

dengan sinar-X) sehingga ketepatannya cukup tinggi. Bahkan pada tengkorak / kerangka pun masih dapat dilakukan metode identifikasi ini. Melalui metode ini diperoleh data tentang jenis kelamin, ras, perkiraan umur, tinggi badan, kelainan pada tulang, dan sebagainya.

6. Pemeriksaan Gigi

Pemeriksaan ini meliputi pencatatan data gigi (*odontogram*) dan rahang yang dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan manual, sinar-X dan pencetakan gigi dan rahang. *Odontogram* memuat data tentang jumlah, bentuk, susunan, tambalan, protesa gigi, dan sebagainya. Seperti halnya dengan sidik jari, maka setiap individu memiliki susunan gigi yang khas. Dengan demikian dapat dilakukan indentifikasi dengan cara membandingkan data temuan dengan data pembanding *antemortem*.

7. Pemeriksaan Serologik

Pemeriksaan serologi bertujuan untuk menentukan golongan darah jenazah. Penentuan golongan darah pada jenazah yang telah membusuk dapat dilakukan dengan memeriksa rambut, kuku, dan tulang. Saat ini telah dapat dilakukan pemeriksaan sidik DNA yang akurasinya sangat tinggi.

8. Metode Eksklusi

Metode ini digunakan pada kecelakaan massal yang melibatkan sejumlah orang yang dapat diketahui identitasnya, misalnya penumpang pesawat udara, kapal laut, dan sebagainya. Bila sebagian

besar korban telah dapat dipastikan identitasnya dengan menggunakan metode indentifikasi yang lain, sedangkan identitas sisa korban tidak dapat ditentukan dengan metode-metode tersebut diatas, maka sisa korban diidentifikasi menurut daftar penumpang.

9. Identifikasi Potongan Tubuh Manusia (Kasus Mutilasi)

Pemeriksaan bertujuan untuk menentukan apakah potongan jaringan berasal dari manusia atau hewan. Bilamana berasal dari manusia, ditentukan apakah potongan-potongan tersebut dari satu tubuh. Penentuan juga meliputi jenis kelamin, ras, umur, tinggi badan, dan keterangan lain seperti cacat tubuh, penyakit yang pernah diderita, serta cara pemotongan tubuh yang mengalami mutilasi.

Untuk memastikan bahwa potongan tubuh berasal dari manusia dapat digunakan beberapa pemeriksaan seperti pengamatan jaringan secara *makroskopik*, *mikroskopik*, dan pemeriksaan *serologik* berupa reaksi *antigen-antibodi* (reaksi *presipitin*). Penentuan jenis kelamin ditentukan dengan pemeriksaan *makroskopik* dan harus diperkuat dengan pemeriksaan *mikroskopik* yang bertujuan menemukan *kromatin* seks wanita, seperti *drumstick* pada *leukosit* dan badan *Barr* pada sel *epitel* serta jaringan otot.

10. Identifikasi Kerangka

Upaya identifikasi pada kerangka bertujuan untuk membuktikan bahwa kerangka tersebut adalah kerangka manusia, ras, jenis kelamin, perkiraan umur, dan tinggi badan, ciri-ciri khusus dan deformitas serta

bila memungkinkan dilakukan rekonstruksi wajah. Dicari pula tanda-tanda kekerasan pada tulang dan memperkirakan sebab kematian. Perkiraan saat kematian dilakukan dengan memperhatikan kekeringan tulang.

Bila terdapat dugaan berasal dari seseorang tertentu, maka dilakukan identifikasi dengan membandingkan data *antemortem*. Bila terdapat foto terakhir wajah orang tersebut semasa hidup, dapat dilaksanakan metode *superimposisi*, yaitu dengan jalan menumpukkan foto *Rontgen* tulang tengkorak diatas foto wajah orang tersebut yang dibuat berukuran sama dan diambil dari sudut pengambilan yang sama, dengan demikian dapat dicari adanya titik-titik persamaan.

11. Pemeriksaan Anatomi

Pemeriksaan Anatomi dapat memastikan bahwa kerangka yang diperiksa tersebut adalah kerangka manusia. Kesalahan penafsiran dapat timbul bila hanya terdapat sepotong tulang saja, dalam hal ini perlu dilakukan pemeriksaan *serologiv* reaksi *presipitin* dan *histologi fumlah* dan diameter *kanal-kanal havers*.

12. Penentuan Ras

Penentuan ras dapat dilakukan dengan pemeriksaan antropologik pada tengkorak, gigi geligi, tulang panggul, atau lainnya. *Arkus zigomatikus* dan gigi *insisivus* atas pertama yang berbentuk seperti sekop memberi petunjuk ke arah ras Mongoloid.

Jenis kelamin ditentukan berdasarkan pemeriksaan tulang panggul, tulang tengkorak, *sternum*, tulang panjang serta *skapula* dan *metakarpal*. Sedangkan tinggi badan dapat diperkirakan dari panjang tulang tertentu, dengan menggunakan rumus yang dibuat oleh banyak ahli melalui suatu penelitian (www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 11 April 2013, Pukul 15:00 WITA).

Djaja Surya Atmaja menemukan rumus untuk populasi dewasa muda di Indonesia :

- $TB = 71,2817 + 1,3346 (tib) + 1,0459(fib)$ (lk 4,8684)
- $TB = 77,4717 + 2,1ggg (tib) + (lk 4,9526)$
- $TB = 76,2772 + 2,2522 (fib)$ (lk 5,0226)

Tulang yang diukur dalam keadaan kering biasanya lebih pendek 2 milimeter dari tulang yang segar, sehingga dalam menghitung tinggi badan perlu diperhatikan.

Rata-rata tinggi laki-laki lebih besar dari wanita, maka perlu ada rumus yang terpisah antara laki-laki dan wanita. Apabila tidak dibedakan, maka diperhitungkan ratio laki-laki banding wanita adalah 100:90. Selain itu penggunaan lebih dari satu tulang sangat dianjurkan. (khusus untuk rumus Djaja Surya Atmaja, panjang tulang yang digunakan adalah panjang tulang yang diukur dari luar tubuh berikut kulit luarnya). Ukuran pada tengkorak, tulang dada, dan telapak kaki juga dapat digunakan untuk menilai tinggi badan. Bila tidak diupayakan rekonstruksi wajah pada tengkorak dengan jalan menambal tulang tengkorak tersebut dengan menggunakan data ketebalan jaringan

lunak pada berbagai titik di wajah, yang kemudian diberitakan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan mengenai kemungkinan identitas kerangka tersebut.

C. Pengertian dan Metode Identifikasi Sidik Jari

1. Pengertian Identifikasi Sidik Jari

Identitas seseorang dapat diketahui dengan melakukan berbagai cara, antara lain, dengan cara mempelajari, mengamati dan meneliti profil wajah seseorang, pas foto, bentuk kepala, bentuk badan, gigi, sidik jari, atau suara. Identifikasi merupakan bagian dari suatu proses untuk mengetahui atau mengenal seseorang berdasarkan organ tubuh atau barang miliknya sehingga seorang yang identitasnya sebelumnya tidak jelas menjadi jelas. Identifikasi melingkupi beberapa hal antara lain: DNA, sidik jari, retina mata, bibir dan lain-lain.

Identitas seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya adalah dengan mempelajari sidik jari, sidik jari seseorang disebut sebagai *daktiloskopi*. *Daktiloskopi* adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Penyelenggaraan daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen dan membuat keterangan sidik jari seseorang. Data sidik jari adalah rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas

kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak kaki. Keterangan sidik jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat *daktiloskopi*.

Daktiloskopi dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah seumur hidup, kecuali menderita luka bakar. Fungsi *daktiloskopi* adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas seseorang.

2. Metode Identifikasi Sidik Jari

Penggunaan sidik jari untuk menangkap pelaku kejahatan pertama kali diusulkan oleh Henry Faulds (seorang dokter dari Skotlandia), dalam suratnya yang dimuat di majalah *Nature* pada Oktober 1880. Pengambilan sidik jari bukanlah teknik modern, karena sesungguhnya bangsa Cina kuno sudah memakai sidik jari sebagai alat identifikasi. Sementara itu, bangsa Babilonia mencetak sidik jari pada tanah liat.

Menurut M. Syamsa Ardisasmita pada artikelnya yang berjudul : Pengembangan Model Matematika Untuk Analisis Sistem Identifikasi Jari Otomatis, menjelaskan bahwa "sidik jari memiliki suatu orientasi dan struktur periodik berupa komposisi dari garis-garis gelap dan kulit

yang naik (*ndges*) dan garis-garis terang dari kulit *langlurun* (*furrows*) yang berliku-liku membentuk pola yang berbeda-beda. Walaupun garis-garis alur tangan terbentuk berbeda-beda, tetapi sifat-sifat khusus dari sidik jari yang disebut dengan *minutiae* adalah unik untuk setiap individu. Ciri-ciri ini membentuk pola khusus yang terdiri dari *terminasi* atau percabangan dari alur. Untuk memeriksa apakah dua sidik jari berasal dari jari yang sama atau bukan, para ahli mendeteksi *minutiae* tersebut menggunakan Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis yang akan mengambil dan membandingkan ciri-ciri tersebut untuk menentukan suatu kecocokan. Metode klasik pengenalan sidik jari sekarang ini tidak terlampaui sesuai untuk implementasi langsung dalam bentuk algoritma komputer. Pembuatan suatu model sidik jari diperlukan dalam pengembangan algoritma analisis baru. Dalam makalah ini dikembangkan metode numerik baru untuk pengenalan sidik jari yang berdasarkan pada penggambaran model matematik dari *dermatoglyphics* dan pemuatan *minutiae*, digambarkan juga rancangan dan penerapan suatu sistem identifikasi sidik jari otomatis yang beroperasi dalam dua tahap, yaitu ekstraksi *minutiae* dan pencocokan *minutiae* (www.batan.go.id, diakses pada tanggal 12 April 2013, Pukul 15:30 WITA).

D. Sejarah Hukum Identifikasi Sidik Jari

Sejarah perkembangan *daktiloskopi* di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya *Koninklitjk Besluit* Nomor 27 Tanggal 16 Januari Tahun

1911 (I.S 1911 Nomor 234) tentang Penugasan Kepada Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau *Daktiloskopi*. Pelaksanaan sistem *daktiloskopi* ini dimulai pada tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah Kantor *Daktiloskopi* Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*) Nomor 21 pada tanggal 30 Maret Tahun 1920 (I.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

Selain itu, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 17 tanggal 28 Maret Tahun 1914 (I.S 1914 Nomor 322). tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termasuk Meester Cornelis, Kepolisian ditugasi untuk mengambil fotografi dan *daktiloskopi* di bagian reserse. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah kekuasaan kepolisian (*the police power*), yakni sebuah kekuasaan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, moral, dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya oleh undang-undang yang berlaku, kekuasaan tersebut kemudian dipercayakan kepada polisi negara. Salah satu tugas penting dan utama yang menjadi tanggung jawab polisi negara dalam bidang keselamatan ialah melakukan tindakan preventif dan represif.

Dalam hal tindakan represif, polisi diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas penyelidikan dan penyidikan itu

bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat polisi tidak ada di tempat kejadian saat tindak pidana berlangsung. polisi (penyidik) tidak tahu benda atau senjata apa yang dipakai, serta tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana melakukannya. Bekal yang dipakai hanyalah korban, barang bukti, dan saksi.

Oleh sebab itu, polisi harus menguasai segala macam ilmu forensik (*forensic sciences*) untuk memudahkan pekerjaannya. Bahkan terkadang polisi masih perlu dibantu ahli forensik. Dalam kasus pembunuhan, misalnya di samping harus menerapkan ilmu forensik yang dikuasainya saat penyelidikan dan penyidikan, polisi masih memerlukan bantuan dokter ahli forensik. Penerapan ilmu kedokteran forensik terasa sekali dalam proses peradilan di negara kita. Dalam proses peradilan itu, tugas utama penegak hukum adalah menemukan kebenaran materiil. Untuk membuktikan kebenaran materiil tersebut, hasilnya bisa berupa mayat, orang hidup, bagian tubuh manusia, atau sesuatu yang berasal dari tubuh manusia. Sebagai contoh Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dinamakan tindak pidana materil yakni tindak pidana yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tertentu (**Leden Marpaung**, 2005:20).

Maka, yang tepat melakukan pekerjaan itu adalah dokter forensik. Penentuan identifikasi manusia merupakan upaya mengenal seseorang, baik hidup maupun mati, dengan menggunakan berbagai sarana ilmu untuk mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Dalam perkara

pidana, mengenali korban merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Karena dengan tahu korbannya, tentu akan terbuka jalan untuk mengenali pelakunya. Oleh karena itu, identifikasi korban seringkali dijadikan titik tolak penyidikan. Perlu diperhatikan, bahwa kesalahan identifikasi bisa mengakibatkan tuntutan seseorang yang tidak bersalah.

Identifikasi sidik jari merupakan bagian dari identifikasi forensik. Proses pengidentifikasian dengan metode identifikasi sidik jari merupakan modus yang kerap kali digunakan aparat penegak hukum (penyidik kepolisian) dalam mengungkap korban maupun pelaku tindak pidana. Aparat kepolisian (penyidik) berlandung pada hukum positif Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Proses identifikasi yang dilakukan pihak Kepolisian (petugas identifikasi) merupakan proses yang diakui dan dibenarkan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan hukum, identifikasi sidik jari merupakan salah satu cara / modus untuk mengungkap korban atau pelaku kejahatan.

Pengambilan sidik jari sebagai sarana identifikasi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) poin (b) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 5 ayat (1) poin (b) mengatur bahwa atas perintah, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a)

karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah melalui banyak perkembangan dan perubahan akhirnya penyidik identifikasi sidik jari tidak lagi mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau peraturan kerajaan zaman Hindia Belanda tetapi mengacu kepada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang telah ditetapkan khususnya Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Pada saat ini para wakil rakyat yang duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sementara membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Penyelenggaraan *Daktiloskopi*. RUU ini nantinya yang akan digunakan sebagai landasan hukum dalam melakukan identifikasi sidik jari (www.legalitas.org, diakses pada tanggal 12 April 2013, Pukul 15:30 WITA).

E. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”.

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah

perbuatan pidana, dan **Leden Marpaung** (2009:7) menggunakan istilah “delik” Ter Haar (**Moeljatno**, 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (**Yan Pramadya Puspa**, 1977:291). D. Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (**Tongat**, 2008:105).

Menurut **Bambang Waluyo** (2008:6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). **R. Abdoel Djamali** (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan menurut Vos (**A. Zainal Abidin Farid**, 1995: 225) memberikan definisi yang singkat, bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pidana yang dimaksud disini adalah hukuman, menurut **R. Soesilo** (1995:35) yang dimaksud

dengan hukuman ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.

Selanjutnya menurut Pompe (**P.A.F. Lamintang**, 1997:182) perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur delik (**P.A.F. Lamintang**, 1997:193-194), yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu :
 - Mencocoki rumusan delik
 - Melawan hukum
 - Tidak ada alasan pembenar
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu :
 - Adanya kesalahan (terdiri dari **dolus** dan **culpa**)
 - Dapat dipertanggungjawabkan
 - Tidak ada alasan pemaaf

Dari unsur-unsur tersebut, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan tidak dapat dipidananya seseorang atau sebagai alasan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan (**Sudarto**, 1990:138). Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan / tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan / tindakan (**Jan Remmelink**, 2003:203).

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar (**Satochid Kartanegara**, 1999:441-442). Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan

delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf (**Roeslan Saleh**, 1983:126).

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

F. Ilmu-Ilmu Pembantu Dalam Hukum Acara Pidana

Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana tidak mudah dilakukan tanpa ada ilmu-ilmu yang membantu dalam menemukan kebenaran. Ilmu-ilmu ini akan sangat berguna bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim, maupun petugas lembaga pemasyarakatan) oleh karena itu bagi aparat penegak hukum wajib membekali diri dengan pengetahuan dari berbagai ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana (**Judarwanto**, 2009: 51). Ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana yang dimaksud adalah :

1. Logika.

Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian disidang pengadilan. kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional (**Judarwanto**, 2009: 51).

2. Psikologi

Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna didalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interograsi, dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa (**Judarwanto**, 2009: 52).

3. Kriminalistik

Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap didalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*), jejak kaki, ilmu racun (*toxikologi*) dan sebagainya (**Judarwanto**, 2009: 52).

4. Kedokteran Kehakiman dan Psikiatri

Kedokteran kehakiman dan psikiatri sangat membantu penyidik, JPU dan hakim didalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang, dalam hal ini

hakim memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikiatri, karena ketika ada yang menjelaskan tentang istilah-istilah medis, hakim, jaksa, dan pengacara tidak terlalu buta (**Judarwanto**, 2009: 52).

5. Kriminologi

Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab sebab dan latar belakang kejahatannya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan, ilmu kriminologi akan sangat membantu terutama pada hakim agar tidak akan terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, karena hakim harus melihat latar belakang dan sebab-sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana (**Judarwanto**, 2009: 52).

6. Penologi

Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman, termasuk juga bagi petugas pemasyarakatan untuk menentukan jenis pembinaan apa yang tepat bagi nara pidana (**Judarwanto**, 2009: 53).

G. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Jika kita berbicara mengenai alat bukti, maka masyarakat pada umumnya tidak dapat membedakan antara alat bukti dan barang bukti, padahal terdapat perbedaan mencolok antara barang bukti dengan alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (**Martiman Prodjohamidjojo**, 1983:19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (**Ratna Nurul Afiah**, 1998:14). Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);

2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh KUHAP di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Andi Hamzah mengatakan :

“Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik” (**Andi Hamzah**, 2008:254).

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

1. Merupakan objek materiil;
2. Berbicara untuk diri sendiri;
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa :

“Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut”.

Ansori Hasibuan berpendapat bahwa “Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai

hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan". Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP)". (Ratna Nurul Afiah, 1998:19).

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (Andi Hamzah, 2008:260).

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (**Hari Sasangka dan Lily Rosita**, 2003:11). Pengertian lain dikemukakan oleh Ade Sanjaya, yang menjelaskan definisi alat-alat bukti yang sah adalah :

“Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (**Darwan Prinst**, 1998:135).

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

“Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

2. Keterangan ahli

“Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

“Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

5. Keterangan terdakwa

“Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar hukum alat bukti keterangan terdakwa Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP. Sedangkan dasar hukum pemeriksaan terdakwa Pasal 175 sampai dengan Pasal 178 KUHAP”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar dan Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak (kepolisian khususnya staf laboratorium forensik POLRESTABES Makassar) yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Instansi Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara :

1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak laboratorium forensik POLRESTABES Makassar.
2. Studi Dokumentasi, mempelajari berkas-berkas, dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi proposal ini maka penulis menyusun bab-bab yang terdiri dari tiga bab, yang mana hubungan antara bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan.

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bab satu adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
2. Bab dua adalah tinjauan pustaka, yang memuat : pengertian dan klasifikasi sidik jari, jenis-jenis identifikasi forensik, pengertian dan metode identifikasi sidik jari, sejarah hukum identifikasi sidik jari, tinjauan umum terhadap tindak pidana, ilmu-ilmu pembantu dalam hukum pidana, dan alat-alat bukti dalam perkara pidana.
3. Bab tiga adalah metode penelitian, yang memuat tentang : lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.
4. Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat tentang : (A) fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana; dan (B) Faktor- faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
5. Bab lima adalah penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Serta
6. Daftar Pustaka

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Mengungkap Pelaku Tindak Pidana

1. Fungsi Sidik Jari

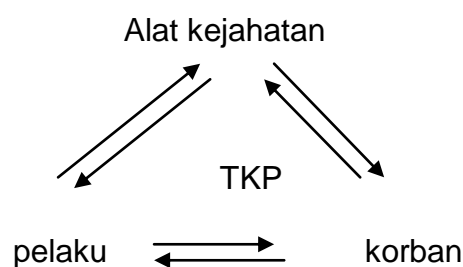
"Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas", istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses Identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian Identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari.

Apabila korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jarinya diambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebagai arsip di Kepolisian. Sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang

dicurigai berdasarkan keterangan saksi atau dengan arsip di Kepolisian. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu alat bukti keterangan saksi. Jadi para penyidik harus pro-aktif untuk mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya.

Selain itu, penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada di dalam rumah itu atau di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Jadi adanya keterkaitan satu sama lain hingga terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di TKP, seperti gambar berikut :

GAMBAR 8
Bukti Segitiga di TKP



Pengungkapan suatu kejahatan oleh pihak kepolisian diawali dengan kasus penyelidikan, sama halnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan (yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini), pihak kepolisian bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) melakukan Tindakan Pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di antaranya

mengamankan TKP dengan memasang *police line* (garis polisi) di sekitar TKP demi kelancaran proses penyidikan. Pihak penyidik kepolisian yang tiba di TKP akan menerima laporan dari pihak yang melakukan Tindakan Pertama di TKP sebagai tanda pelimpahan kasus ke tahap penyidikan untuk melakukan Olah TKP. Penyidik yang akan masuk ke TKP sebelumnya mendapat arahan dari ketua tim olah TKP di antaranya jalur yang akan dilalui tim penyidik (alur silang) di TKP, perlengkapan, dan banyaknya personil.

Apabila pada saat itu pelaku tidak tertangkap tangan atau identitas pelaku masih kabur dan tim penyidik menemukan adanya bekas sidik jari yang ditinggalkan pelaku di TKP, maka penyidik bekerja sama dengan tim identifikasi sidik jari untuk mengungkap pelaku berdasarkan sidik jari laten di TKP. Penyidik mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi di sekitar TKP. Mereka yang dicurigai oleh penyidik diambil sidik jarinya untuk dicocokkan dengan sidik jari laten di TKP. Mereka yang dicurigai tidak dapat menolak untuk diambil sidik jarinya berdasarkan wewenang penyidik (Pasal 7 KUHP).

Jadi, identifikasi sidik jari pelaku tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan pembandingan yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data di Kepolisian. Pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alat

kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, ia menjelaskan bahwa kelengkapan untuk melakukan identifikasi sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah :

1. Serbuk biasa;
2. Serbuk magnet;
3. Kuas sidik jari;
4. Tinta sidik jari;
5. Blanko AK 23;
6. Lifter;
7. Kaos tangan.

Bapak Daniel menambahkan bahwa (berdasarkan hasil wawancara penulis, pada hari Jumat, 23 Agustus 2013) pada saat di TKP tindakan yang diambil penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yaitu :

1. Mencari dan angkat sidik jari laten di TKP;
2. Mengambil sidik jari mayat di TKP;
3. Mengambil sidik jari keluarga korban atau yang ada hubungan / kepentingan dengan korban di TKP;
4. Mengambil sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus yang diteliti, maka penulis terlebih dahulu akan

mendeskripsikan secara singkat mengenai kasus yang diteliti. Kronologis kejadian kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Terdakwa Stevanus David Lotuju Alias Steven, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008, sekitar pukul 21:00 WITA bertempat di Jalan Maccini Kidul Nomor 5 Makassar, terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa merasa dendam dan sakit hati terhadap korban Hj. Yulin dan korban Salma Kusumayuda, karena sebelumnya terdakwa dituduh mengambil / mencuri handphone milik Salma Kusumayuda dan setiap terdakwa lewat di depan rumah korban, baik Hj. Yulin maupun Salma Kusumayuda selalu meludah seolah-olah menyindir terdakwa, sehingga pada waktu tersebut di atas, terdakwa teringat kembali akan tuduhan kedua korban tersebut.

Selanjutnya pada pukul 10:00 WITA, terdakwa menuju rumah korban lalu menyimpan pisau di dekat pagar tempat cuci piring korban dan terdakwa kembali kerumahnya duduk-duduk, dan sekitar pukul 18:25 WITA terdakwa mendatangi kembali rumah korban lalu mengambil pisau yang sebelumnya telah disimpan terlebih dahulu, kemudian pisau tersebut dimasukkan ke dalam saku celana kanan pada bagian belakang dan masuk ke dalam warung yang menyatu dengan rumah milik korban dan bersembunyi sekitar 20 (dua puluh) menit.

Selanjutnya setelah terdakwa melihat kedua korban naik ke lantai dua dan pada saat itu lampu mati, kemudian terdakwa secepatnya mengikuti kedua korban dari belakang, dan setelah tiba di lantai dua terdakwa melihat linggis di atas meja lalu diambarnya, kemudian secepatnya dipukulkan ke kepala bagian belakang dari tubuh korban Hj. Yulian sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, akan tetapi bersamaan dengan jatuhnya Hj. Yulian ke lantai kemudian Salma Kusumayuda membalikkan badannya ke arah terdakwa sehingga terdakwa juga memukulkan linggis ke arah Salma Kusumayuda yang mengenai kepala korban bagian atas sehingga jatuh terduduk di lantai, kemudian korban Salma Kusumayuda berusaha masuk ke dalam kamar sambil menyeret badannya dalam keadaan duduk (ngesot), akan tetapi pada saat Salma Kusumayuda akan menutup pintu kamar dengan cara menggunakan kakinya, tiba-tiba terdakwa mendekatinya.

Selanjutnya dengan mempergunakan linggis, terdakwa memukul linggis tersebut ke arah Salma Kusumayuda yang mengenai pada bagian tangan kiri, dan bersamaan dengan itu secara tiba-tiba Hj. Yulian tersadar dan langsung menarik / menjambak rambut terdakwa dari arah belakang, sehingga terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan dari Hj. Yulian dengan cara memukulkan pisau ke tangannya, sehingga pegangan tangan Hj. Yulian terlepas dari kepala terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menyimpan pisau tersebut di atas meja, lalu mengambil linggis kembali dan di pukulkan ke arah korban Hj. Yulian sehingga tidak sadar lagi, kemudian terdakwa kembali membuka pintu kamar dimana korban Salma Kusumayuda berada, lalu memukulkan linggis tersebut ke kepala korban hingga korban Salma Kusumayuda terjatuh ke belakang dalam keadaan terlentang di lantai, dan setelah itu, terdakwa secepatnya mengambil pisau yang sebelumnya disimpan di atas meja lalu secepatnya menggorok leher kedua korban dan menikam pada bagian perut dan dada secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban Hj. Yulin dan korban Salma Kusumayuda menderita pada :

Pemeriksaan Luar :

1. Luka-luka pada kulit kepala :

- 1 luka memar pada pelipis kanan, ukuran 3CM X 1,5CM, terletak 8CM dari garis tengah tubuh;
- 1 luka memar pada dahi yang memotong garis tengah tubuh, ukuran 2CM X 2CM;
- 1 luka memar pada daun telinga kanan, ukuran 2CM X 1CM;
- 1 luka terbuka pada ubun-ubun, ukuran 5CM X 1CM, terletak 14CM dari garis mata, kedua ujung luka tumpul, pada ujung luka terdapat jembatan jaringan, tepi luka rata, tebing luka tidak rata dan terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, dan otot, dan dasar luka terdiri dari tulang, ketika ditautkan luka bias rapat dan membentuk garis lurus di sekitar garis batas luka terdapat memar;
- 1 luka terbuka di kepala bagian belakang, ukuran 4CM X 1CM, terletak 8CM dari batas rambut belakang dan 2CM di kanan garis tengah tubuh, tepi luka tidak rata, kedua ujung luka tumpul dan terdapat jembatan jaringan, tepi luka tidak rata, dan terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, dan otot, dan dasar luka terdiri dari tulang kepala, ketika ditautkan luka tidak rapat di sekitar garis batas luka terdapat memar;

- 1 luka terbuka pada belakang kepala, ukuran 5CM X 5CM, terletak 3CM dari sebelah kiri garis tengah tubuh, dan 12CM dari batas rambut belakang, tepi luka tidak rata dan membentuk beberapa sudut, pada kedua ujung luka terdapat jembatan jaringan, tepi luka tidak rata, dan terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, dan otot, dan dasar luka terdiri dari tulang kepala, ketika dirapatkan terdapat beberapa bagian yang tidak rapat sekitar garis batas luka terdapat memar.

2. Luka pada kulit leher :

- 1 luka terbuka pada leher depan, ukuran 16CM X 13CM, ujung luka runcing, ujung luka sebelah kanan membentuk beberapa sudut dengan arah berlawanan, bagian tengah luka terdapat sisa jaringan yang tidak putus, tepi luka rata, dan terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot, pada eksplorasi tampak pembuluh darah leher terputus, pangkal tenggorokan terputus, pangkal kerongkongan terputus, otot leher kanan terputus, dasar luka terdiri dari tulang leher yang dipermukaannya terdapat luka iris, disekitar luka tidak terdapat memar, ketika ditautkan luka rapat, di sekitar garis luka tidak terdapat memar;
- 1 luka terbuka pada leher bagian bawah kiri, ukuran 4CM X 0,5CM, kedua sudut luka runcing, tepi luka rata, dan terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan sedikit otot, dasar luka terdiri dari otot, ketika ditautkan luka rapat, di sekitar garis luka tidak terdapat memar;
- 1 luka terbuka pada leher bagian depan bawah pada garis batas antara tulang dada dan leher, ukuran 2CM, ketika ditautkan luka rapat dan membentuk garis melengkung, ujung atas luka terletak 1CM dari kiri garis tengah tubuh, ujung bawah 0,5CM dari kiri garis tengah tubuh, ujung luka tajam, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan dan terdirir atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot, disekitar luka tidak terdapat memar.

3. Bahu Kiri :

- Terdapat 1 luka pada pangkal bahu kiri ukuran 5CM X 1CM. Terletak 1CM dari garis tengah lengan, berbentuk melengkung ke atas tepi luka rata, tepi luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan ikat, dasar luka terdiri dari jaringan ikat.
- Bahu kanan tidak ada kelainan tertentu.

Kesimpulan pada pemeriksaan tersebut, korban Salma Kusumayuda meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena terputusnya pembuluh darah besar di leher akibat kekerasan benda tajam dan diperberat oleh kegagalan pernapasan akibat masuknya darah ke dalam saluran pernapasan.

Sedangkan sebab kematian korban Hj. Yulian adalah kegagalan sirkulasi akibat pendarahan disebabkan terputusnya pembuluh darah besar yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada leher dan diperberat oleh kegagalan pernapasan akibat masuknya darah ke dalam saluran pernapasan yang disebabkan oleh terpotongnya trakea (batang tenggorok) dan kedua korban meninggal dunia seketika itu juga setelah kejadian.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar masing-masing nomor KS.17/VER/2008 dan nomor KS.18/VER/2008 tertanggal 6 & 17 September 2008 yang ditandatangani oleh DR. dr. Gatot S. Lawrence, M.Sc., Sp.PA (K)., DFM., Sp.F. sebagai dokter konsulen, dr. Jerni Dase dan dr. Mauluddin Mansyur sebagai pemeriksa.

Dalam kasus ini fungsi identifikasi sidik jari sangat penting untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Penyidik yang telah melakukan olah TKP menemukan banyak jejak kaki yang bersimbah darah di TKP (lantai II rumah korban). Setelah melakukan pengambilan sidik jari terhadap korban beserta keluarga korban yang tinggal bersama korban di rumah tersebut dan mencocokkan dengan sidik jari laten serta jejak kaki di TKP maka, penyidik menemukan ada satu jenis sidik jari laten dan jejak kaki itu bukan milik korban ataupun keluarga korban yang tinggal bersama korban di Ruko tersebut. Setelah memperoleh keterangan dari beberapa saksi yang merupakan tetangga korban maka penyidik memanggil pelaku Stevanus David Lotuju untuk dimintai keterangan serta diambil sidik jarinya.

Awalnya pelaku menolak untuk diambil sidik jarinya, namun penyidik bagian identifikasi Polda Sulselbar berhasil mengambil sidik jari pelaku. Setelah penyidik identifikasi Polda Sulselbar mencocokkan sidik jari laten dan jejak kaki di TKP terdapat beberapa kesamaan dengan sidik jari pelaku. Berdasarkan hasil Visum ini pelaku kemudian diperiksa mengenai kepentingan pelaku di rumah korban (TKP). Walaupun awalnya pelaku menyangkal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut namun berdasarkan keterangan saksi di sekitar rumah korban yang juga adalah adik korban maka pelaku tidak dapat menyangkal lagi keterlibatannya sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan tersebut, akibat perbuatannya tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.B/2009/PN.Mks. terdakwa (Stevanus David Lotuju) diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup.

Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Namun, apabila tidak ditemukan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu kasus untuk menemukan pelaku maka penyidik identifikasi mencari bahan perbandingan di arsip Kepolisian mengenai data penduduk Indonesia yang sidik jarinya ada dalam data / arsip Kepolisian. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti

pembantu alat bukti lainnya. Namun alat bukti keterangan ahli (dokter yang mengidentifikasi sidik jari) merupakan alat bukti yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah.

Identifikasi sidik jari terhadap korban tindak pidana pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengenal atau mengetahui, mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dalam hal korban tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya (korban yang diketemukan) proses identifikasi sidik jari dilakukan demi mengenal identitas korban untuk dilaporkan kepada keluarganya dan untuk dilakukan visum / otopsi terhadap korban agar dapat dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dalam hal korban yang sudah diketahui identitasnya pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan berita acara dan sebagai sarana pembantu untuk memperjelas identitas korban.

2. Akibat Hukum Kesalahan Identifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana.

Identitas korban dan pelaku dalam suatu kasus tindak pidana sangatlah penting. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan identitas korban dan pelaku adalah hal mutlak yang lebih dahulu diungkap oleh penyidik. Suatu kasus tindak pidana pembunuhan tidak dapat diproses atau di peradilanakan apabila korban dan pelaku tidak diketahui identitasnya, walaupun sudah jelas ada korban tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, maka identitas korban adalah hal mutlak

yang harus diungkap terlebih dahulu oleh penyidik. Namun, dengan tidak mengesampingkan identitas pelaku juga, sebab suatu tindak pidana pembunuhan tanpa identitas pelaku bukanlah suatu tindak pidana yang dapat di peradilan. Demi keadilan (*pro justitia*) identifikasi korban dan pelaku tindak pidana pembunuhan harus dapat dibuktikan secara ilmiah bukan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi.

Setiap perkara tindak pidana pembunuhan yang di peradilan selalu menyertakan identitas pelaku dan korban yang jelas. Akibat hukum apabila terdapat kesalahan identitas (*error in persona*) terdakwa terhadap suatu perkara dalam proses peradilan adalah batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP) sehingga terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, sedangkan jika terjadi kesalahan identitas pada korban maka terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya tetapi tidak berarti tersangka lepas dari proses hukum karena tersangka harus menunggu proses penyidikan ulang terhadap identitas korban sebenarnya sampai batas waktu ditentukan oleh jaksa untuk dilanjutkan ke proses peradilan.

Oleh sebab itu, pentingnya identifikasi terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan Identitas pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, ekonomis dan

akurat. Alat bukti keterangan ahli menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Barang bukti sidik jari dilihat dari segi ilmiah merupakan barang bukti yang sangat akurat, oleh karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama. Salah satu hak terdakwa di pengadilan adalah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun jika dapat dibuktikan secara ilmiah baik oleh ahli forensik; ahli identifikasi sidik jari Kepolisian atau ahli lain di bidangnya akan tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa tidak dapat menyangkal lagi akan tindak pidana yang dilakukannya (di dakwakan terhadapnya). Semakin banyak barang bukti atau keterangan yang ditemukan dalam proses penyidikan atau pengadilan berarti semakin mudah mengungkap tindak pidana tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Pihak Kepolisian Dalam Menggunakan Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Korban Dan Mengungkap Pelaku Tindak Pidana.

Dalam pelaksanaannya identifikasi sidik jari juga menemukan banyak kendala atau hambatan sebagai sarana identifikasi baik terhadap korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan (Kantor POLRESTABES Makassar) hambatan-hambatan tersebut terbagi atas dua yaitu :

1. Hambatan diTKP;
2. Hambatan di luar TKP

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian berada di TKP khususnya dalam mencari sidik jari laten sedangkan hambatan di luar TKP merupakan hambatan yang terjadi selama proses pengidentifikasian baik di dalam laboratorium forensik maupun ditempat lain selain di TKP.

1. Faktor Di TKP

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di TKP antara lain :

a. Iklim/Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Jumat, 23 Agustus 2013. Salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di TKP yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, contohnya : seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (*outdoor*). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP.

b. Hewan/Binatang

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme

(bakteri) yang merusak TKP dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak TKP dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah TKP dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel / Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Jumat, 23 Agustus 2013).

c. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar TKP juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di TKP sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP, akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di TKP, contohnya : seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar TKP berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di TKP sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di TKP. Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel / Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Jumat, 23 Agustus 2013).

d. Petugas Identifikasi

Petugas identifikasi juga dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi (*eror in persona*) di TKP. Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel / Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Jumat, 23 Agustus 2013).

e. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel / Staf Forensik POLRESTABES Makassar, pada hari Jumat, 23 Agustus 2013).

2. Hambatan Di Luar TKP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Daniel (Staf Forensik POLRESTABES Makassar), pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, Ia menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang umumnya dari luar TKP yaitu kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian wilayah/daerah setempat.

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di TKP menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari. Selain itu, hambatan juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal warga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar TKP untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas

identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari (dalam kepolisian) ditambah personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang.
2. Sebaiknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan TKP dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) TKP, dan setiap jenazah / korban wajib untuk diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Bagian 3, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, 2007. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Judarwanto, 2009, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Yudhasmara Publisher.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politea.

Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Satjipto Rahardjo, 2006. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satochid Kartanegara, 1997. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

Supardi, 2002, *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.

Sumber Lain :

www.batan.go.id

www.wikipedia.org

www.legalitas.org